

ABSTRAK

Pelayanan kefarmasian merupakan sebuah kegiatan pelayanan langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien dengan tujuan hasil yang pasti untuk meningkatkan kesehatan pasien. Kegiatan ini harus didukung oleh sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar. Apoteker berperan penting dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas tidak hanya tentang pengadaan obat, akan tetapi apoteker juga dituntut untuk dapat memberikan pelayanan informasi kepada pasien. Untuk mengukur mutu pelayanan kefarmasian yang di puskesmas dapat digunakan instrumen daftar tilik dari kementrian kesehatan. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbedaan mutu pelayanan kefarmasian pada kelompok puskesmas yang memiliki apoteker dan kelompok puskesmas yang tidak memiliki apoteker di Kabupaten Karawang. Penelitian ini merupakan penelitian observasi melalui pendekatan *purposive sampling* dengan menggunakan modul tilik *Traning Of Trainer* yang digunakan oleh Kemenkes dalam menilai tingkat mutu pelayanan Kefarmsian di Puskesmas. Kabupaten karawang memiliki sebanyak 50 puskesmas. Sembilan (8) diantaranya adalah puskesmas yang memiliki SDM apoteker. Empat puluh dua (42) diantaranya tidak memiliki SDM apoteker. Dari 8 puskesmas yang memiliki apoteker dikategorikan 8 puskesmas baik. Sedangkan dari 42 puskesmas yang tidak memiliki apoteker 30 puskesmas dikategorikan sedang dan 12 puskesmas dikategorikan kurang. Berdasarkan dari hasil analisis menggunakan metode statistik uji paired test menunjukkan nilai P value 0,044 ($<0,05$) Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Apoteker berpengaruh terhadap mutu pelayanan kefarmasian di puskesmas Kabupaten Karawang berdasarkan instrumen daftar tilik pelayanan kefarmasian di Puskesmas.

Kata Kunci : puskesmas, pelayanan kefarmasian, apoteker, permenkes no 74 tahun 2016, permenkes no 26 tahun 2020

ABSTRACT

Pharmaceutical service is a direct service activity and is responsible for patients with the aim of definite results to improve patient health. This activity must be supported by human resources as well as facilities and infrastructure that are in accordance with standards. Pharmacists play an important role in pharmaceutical services at puskesmas not only about drug procurement, but pharmacists are also required to be able to provide information services to patients. To measure the quality of pharmaceutical services in Public health center, a checklist instrument from the ministry of health can be used. The purpose of this study was to determine the differences in the quality of pharmaceutical services in the community health center group that had a pharmacist and the community health center group that did not have a pharmacist in Karawang Regency. This study is an observational study using a purposive sampling approach using the Training of Trainer module which is used by the Ministry of Health in assessing the level of quality of pharmaceutical services at the Puskesmas. Karawang regency has as many as 50 health centers. Nine (8) of them are Public health center that have pharmacist human resources. Forty-two (42) of them do not have pharmacist human resources. Of the 8 Public health center that have pharmacists, 8 are categorized as good health centers. Meanwhile, of the 42 health centers that do not have pharmacists, 30 health centers are categorized as moderate and 12 health centers are categorized as lacking. Based on the results of the analysis using the paired test statistical method, it shows a P value of 0.044 (<0.05). So it can be concluded that the presence of pharmacists affects the quality of pharmaceutical services at the Karawang District Health Center based on the pharmaceutical service checklist instrument at the Puskesmas.

Keywords; *Public Health Center pharmaceutical services, pharmacists, Minister of Health No. 74 of 2016, Minister of Health No. 26 of 2020*